



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT RUMPUT LAUT

TAHUN **2025**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
DIREKTORAT RUMPUT LAUT
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Rumput Laut tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025.

Direktorat Rumput Laut terus berkomitmen untuk mengembangkan sektor budi daya rumput laut secara berkelanjutan, guna mendukung pencapaian target produksi dan peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha dan pembudi daya rumput laut. Dalam laporan ini, disajikan capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta Langkah-langkah strategis sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pembangunan rumput laut.

Laporan kinerja Direktorat Rumput Laut tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai kinerja Direktorat Rumput Laut, sekaligus menjadi bahan evaluasi, serta referensi bagi pemangku kepentingan dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat dalam perencanaan pengembangan sektor rumput laut di masa mendatang.

Jakarta, 23 Januari 2026
Direktur Rumput Laut,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nono Hartanto

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Satker Direktorat Rumput Laut Tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat menjadi tanggung jawab Satker Direktorat Rumput Laut.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami tersebut, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan ini.

Jakarta, 23 Januari 2026

Tim Reviu Laporan Kinerja DJPB
Kementerian Kelautan dan Perikanan



(Ida Widaningsih)
Analisis Kebijakan Muda

Tim Reviu Laporan Kinerja DJPB
Kementerian Kelautan dan Perikanan



(Asrianti Eka Rahmadi)
Perencana Pertama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB 1. PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Tugas dan Fungsi.....	3
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)	4
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya.....	7
1.5.1. Potensi.....	7
1.5.2. Permasalahan.....	7
1.6. Sistematika Laporan Kinerja (LKj).....	7
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025-2029.....	9
2.2. Sasaran Kegiatan	10
2.3. Penetapan Kinerja.....	10
2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2025	13
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2. Analisis Kinerja	15
3.2.1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut.....	15
3.2.1.1. Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - ' <i>Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas</i> '.....	15
3.2.1.2. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat.....	19
3.2.1.3. Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB)	22
3.2.1.4. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut.....	27
3.2.2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut.....	39
3.2.2.1. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut	39
3.2.2.2. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut	40
3.2.2.3. Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Rumput Laut	41
3.2.2.4. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut	43
3.2.2.5. Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut.....	44
3.2.2.6. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut	44

3.2.2.7. Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Rumput Laut	46
3.3. Akuntabilitas Keuangan	47
BAB 4. PENUTUP.....	48
4.1. Kesimpulan	48
4.2. Rekomendasi.....	48
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Rumput Laut	15
Tabel 3.2.	Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - <i>'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas'</i> Tahun 2025	17
Tabel 3.3.	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat Tahun 2025	20
Tabel 3.4.	Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Tahun 2025	25
Tabel 3.5.	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut Tahun 2025	27
Tabel 3.6.	Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut Tahun 2025	39
Tabel 3.7.	Nilai PM SAKIP Lingkup Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025	39
Tabel 3.8.	Indeks Profesional ASN Satker Direktorat Rumput Laut Tahun 2025	41
Tabel 3.9.	Indeks Profesional ASN Lingkup Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025	41
Tabel 3.10.	Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Rumput Laut Tahun 2025	42
Tabel 3.11.	Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025	42
Tabel 3.12.	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Rumput Laut Tahun 2025	43
Tabel 3.13.	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025	43
Tabel 3.14.	Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut Tahun 2025	44
Tabel 3.15.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut Tahun 2025	45
Tabel 3.16.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025	45
Tabel 3.17.	Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Rumput Laut Tahun 2025	46
Tabel 3.18.	Penyelesaian Identifikasi SOP Lingkup Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025	46
Tabel 3.19.	Realisasi Keuangan Direktorat Rumput Laut Tahun 2025	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	4
Gambar 1.2.	Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawai Direktorat Rumput Laut	5
Gambar 1.3.	Jumlah pegawai berdasarkan Golongan ASN di Direktorat Rumput Laut	5
Gambar 1.4.	Jumlah pegawai berdasarkan Tim Kerja di Direktorat Rumput Laut	6
Gambar 2.1.	Perjanjian Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2025	12
Gambar 2.2.	NKO Direktorat Rumput Laut Tahun 2025	14
Gambar 3.1.	Identifikasi Lokasi Potensial Budi Daya Rumput Laut di (a) Kab. Sumba Timur; (b) Kab. Sumba Barat; (c) Kab. Sabu Raijua; dan (d) Kab. Banggai Kepulauan	18
Gambar 3.2.	Penyaluran Bantuan Bibit Rumput Laut kepada Masyarakat oleh UPT DJPB di (a) Kota Tual; (b) Kab.Lombok Timur; (c) Kab. Pinrang; (d) Kota Batam; dan (e) Kab. Sumenep	21
Gambar 3.3.	Sosialisasi pembinaan CBIB rumput laut di (a) Kab. Kupang; (b) Kab.Rote Ndao; (c) Kab.Takalar; dan (d) Kab. Pangkajene dan Kepulauan	26
Gambar 3.4.	Survei Lokasi Penjemuran di Kab. Buton Tengah	34
Gambar 3.5.	Survei Pengukuran Kualitas Air di Kab. Muna	36
Gambar 3.6.	Survei Lokasi Budi Daya Rumput Laut Eksisting di Kab. Muna Barat	38

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025 dalam aplikasi Kinerjaku Direktorat Rumput Laut mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 108,37 dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 11 indikator kinerja. Adapun capaian indikator kinerja Direktorat Rumput Laut tahun 2025, yaitu:

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025
1	Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas' (unit)	1	1
2	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat (Kg)	14.619	16.850
3	Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB) (unit)	14	378
4	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut (rekomendasi kebijakan)	6	9
5	Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut (nilai)	84	85,20
6	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut (Indeks)	81	83,26
7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut (persen)	100	100
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut (Persen)	85	94,59
9	Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	80	100
10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut (nilai)	80	73,52
11	Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Rumput Laut (persen)	100	100

Capaian indikator Direktorat Rumput Laut Tahun 2025 pada tabel di atas menunjukkan hasil yang baik karena telah mencapai target, kecuali 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target yaitu nilai pengawasan kearsipan internal satker direktorat rumput laut.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi biru, serta pelestarian sumber daya dan lingkungan. Pengembangan subsektor perikanan budi daya merupakan bagian strategis dalam upaya transformasi ekonomi nasional yang memerlukan perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien.

Salah satu Kegiatan Prioritas (KP) pada strategi pembangunan perikanan budi daya sesuai dengan RPJMN 2025-2029 yaitu pengembangan hilirisasi rumput laut yang mendukung Prioritas Nasional 5 (PN-5) melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Rumput laut sebagai salah satu komoditas prioritas nasional berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja di wilayah pesisir, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen rumput laut terbesar di dunia. Direktorat Rumput Laut yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, memiliki mandat untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan budi daya rumput laut.

Kinerja Direktorat Rumput Laut berperan penting dalam mendukung target pembangunan kelautan dan perikanan nasional, khususnya dalam peningkatan produksi, penguatan sistem usaha, pembinaan pelaku usaha, serta pemanfaatan teknologi budi daya. Penyusunan laporan kinerja dilandaskan pada kerangka regulasi nasional, yaitu UU No.25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan; serta PP No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai bentuk bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh anggaran negara.

Laporan kinerja Direktorat Rumput Laut tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), sekaligus menjadi instrumen

evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang dalam dokumen perencanaan tahunan. Melalui laporan ini diharapkan dapat terlihat tingkat pencapaian sasaran strategis, efektivitas pelaksanaan program, serta tantangan dan rekomendasi perbaikan ke depan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja (LKj) Direktorat Rumput Laut tahun 2025 ini diantaranya sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Rumput Laut, penyampaian capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan, penyajian data dan informasi sebagai dasar evaluasi kebijakan dan pengambilan Keputusan di periode selanjutnya, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Permen No.2 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 165, Direktorat Rumput Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut.

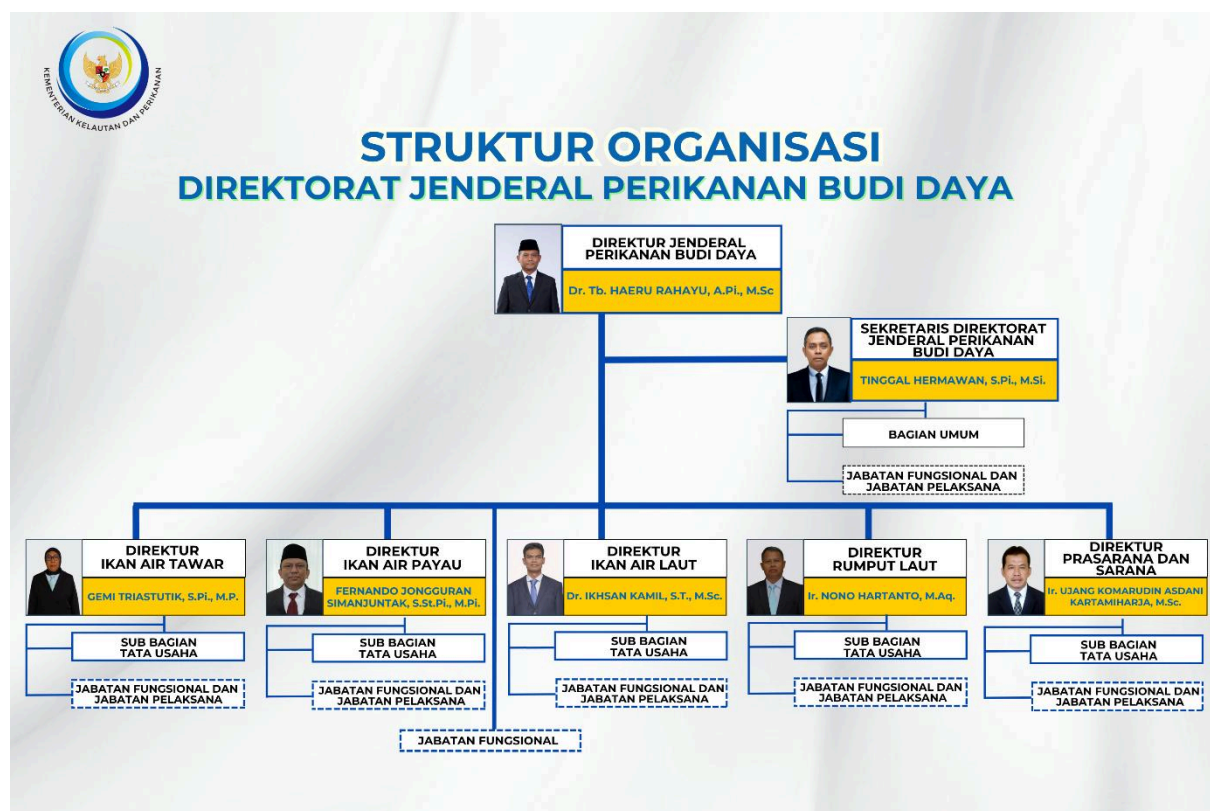
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Direktorat Rumput Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut;

- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Rumput Laut.

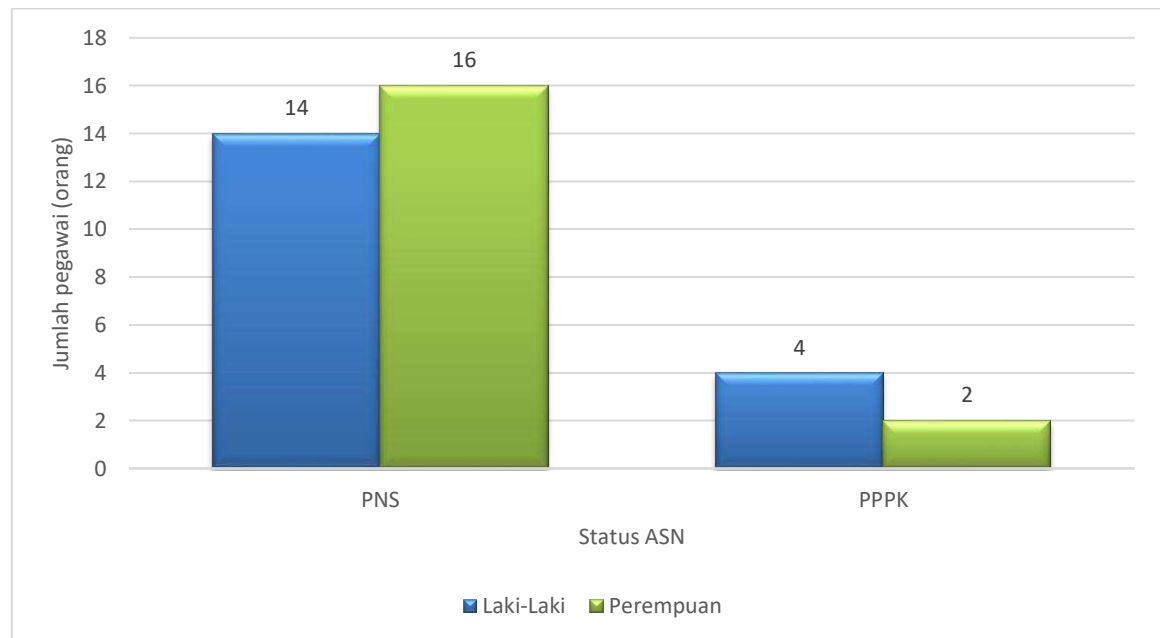
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Direktorat Jenderal Perikanan terdiri atas Sekretariat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Ikan Air Tawar, Direktorat Ikan Air Payau, Direktorat Ikan Air Laut, Direktur Rumput Laut, dan Direktur Prasarana dan Sarana (Gambar 1.1.).



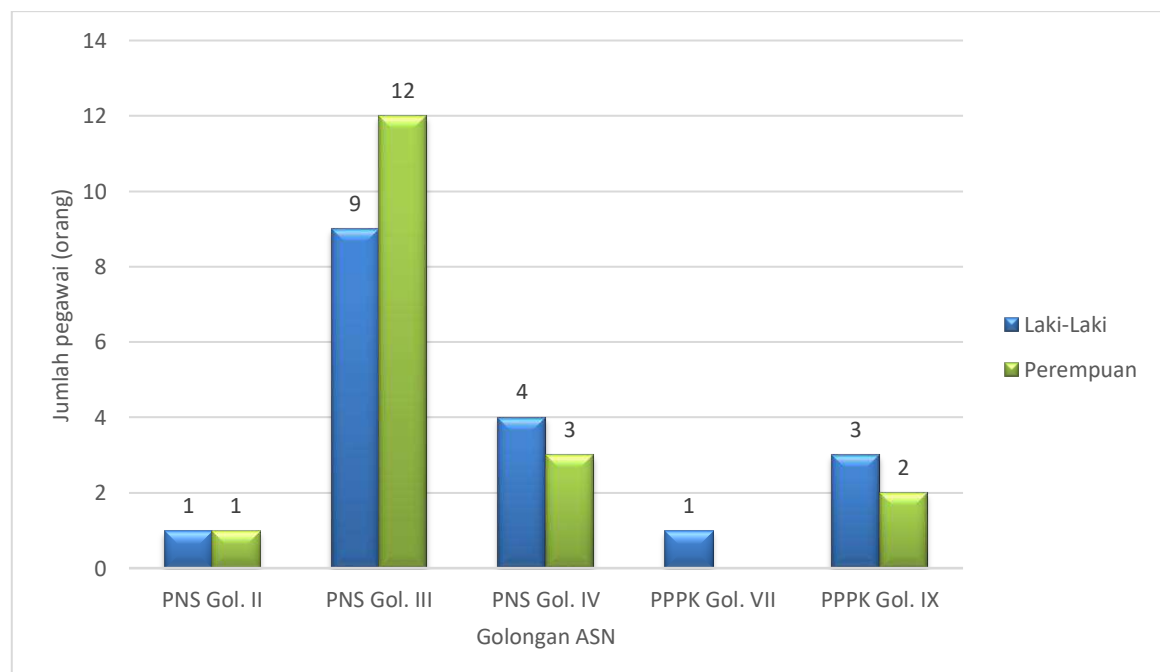
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Direktorat Rumput Laut memiliki jumlah total pegawai yang bertugas sebanyak 36 orang yang dipimpin oleh Direktur Rumput Laut dengan rincian pegawai berdasarkan status kepegawaian tercantum pada Gambar 1.2.



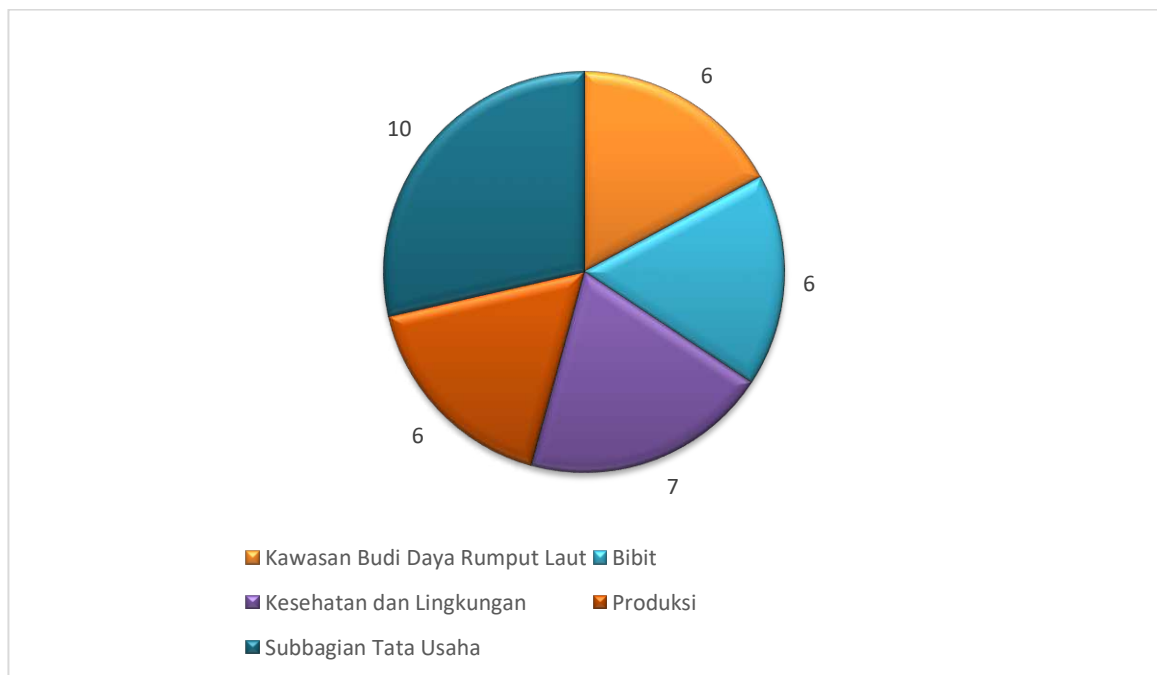
Gambar 1.2. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Direktorat Rumput Laut

Komposisi pegawai di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai laki-laki cukup berimbang, mencerminkan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selain itu, rincian pegawai berdasarkan golongan PNS dan PPPK tercantum pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan ASN di Direktorat Rumput Laut

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya nomor 161 tahun 2025 tentang ketua tim kerja di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Surat Tugas Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya nomor B.1039/DJPB/KP.430/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang penugasan pegawai lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, bahwa Direktorat Rumput Laut terdiri atas ketua anggota dan tim kerja sebagai berikut: (1) Tim kerja kawasan budi daya rumput laut; (2) Tim kerja bibit; (3) Tim kerja kesehatan dan lingkungan; (4) Tim kerja produksi; dan (5) Tim subbagian tata usaha.



Gambar 1.4. Jumlah pegawai berdasarkan Tim Kerja di Direktorat Rumput Laut

Berdasarkan data di atas, tim kerja dukungan manajemen memiliki jumlah pegawai terbanyak, yaitu 10 orang. Kemudian tim kerja kesehatan ikan memiliki jumlah pegawai sebanyak 7 orang. Tiga tim kerja lainnya yaitu tim kerja kawasan budi daya, tim kerja bibit, dan tim kerja produksi memiliki jumlah pegawai yang sama, masing-masing 6 orang. Secara umum, komposisi pegawai antar tim mengarah pada prinsip efektivitas dan efisiensi organisasi. Selain itu, optimalisasi struktur dan distribusi pegawai berdasarkan kebutuhan operasional masing-masing tim kerja.

Direktorat Rumput Laut terus mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalisme pegawai melalui pelatihan teknis, pengembangan kompetensi ASN, serta peningkatan nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.

1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

1.5.1. Potensi

Pembangunan perikanan budi daya di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional. Salah satu komoditas prioritas adalah rumput laut, dimana Indonesia merupakan produsen terbesar di dunia untuk jenis *Kappaphycus alvarezii*. Selain itu, jenis rumput laut lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan yaitu *Gracillaria*, *Ulva*, dsb.

Potensi rumput laut tidak hanya terbatas pada sektor pangan dan bahan baku industri kosmetik maupun farmasi, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung substitusi impor bahan baku industri berbasis bioteknologi. Wilayah pesisir Indonesia sangat cocok untuk budi daya rumput laut karena kondisi perairannya yang optimal, suhu stabil, dan tersedianya kawasan yang relatif luas, namun belum dimanfaatkan secara optimal.

1.5.2. Permasalahan

Di sisi lain, pengembangan budi daya rumput laut juga menghadapi berbagai permasalahan. Masalah utama bibit rumput laut di Indonesia adalah ketergantungan pada bibit hasil perbanyakan vegetatif, yaitu potongan tanaman yang diambil berulang kali dari induk yang sama, hal ini yang menyebabkan menurunnya kualitas genetik bibit. Selain itu, keterbatasan teknologi budi daya yang ramah lingkungan, masih rendahnya akses terhadap teknologi pascapanen dan pemasaran turut membatasi nilai tambah yang dapat dihasilkan, serta fluktuasi harga pasar yang tidak stabil, kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim, pencemaran laut, dan serangan hama dan penyakit yang dapat menurunkan hasil panen. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, peneliti, masyarakat, pembudi daya, dan *stakeholder* lainnya agar potensi budi daya rumput laut dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

1.6. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)

Laporan kinerja (LKJ) ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Direktorat Rumput Laut tahun 2025. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Direktorat Rumput Laut, LKj ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 dengan target kinerja pada tahun

sebelumnya. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*), sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Rumput Laut pada tahun 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Rumput Laut termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan kinerja.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini disajikan sasaran kegiatan, gambaran singkat mengenai penetapan kinerja, serta pengukuran capaian kinerja direktorat rumput laut tahun 2025.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Rumput Laut serta evaluasi dan analisis kinerja tahun 2025. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Renstra DJPB) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan budi daya. Renstra DJPB ini disusun dengan berpedoman kepada Renstra KKP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Arah kebijakan KKP terkait pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) yang merupakan Misi Asta Cita dari Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, strategi pembangunan perikanan budi daya sesuai dengan RPJMN 2025-2029. Untuk itu, bidang budi daya rumput laut, mendukung Prioritas Nasional 5 (PN-5) - Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; Program Prioritas - Pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor; Kegiatan Prioritas - Pengembangan hilirisasi rumput laut.

Strategi untuk meningkatkan produktivitas perikanan budi daya secara berkelanjutan difokuskan pada komoditas ekspor unggulan, seperti udang, rumput laut, lobster, kepiting, nila, dan komoditas ekspor penting lainnya, serta komoditas perikanan budi daya yang dikonsumsi masyarakat untuk mendukung program swasembada pangan, diantaranya dilakukan melalui:

1. Mengalokasikan kawasan pengembangan perikanan budi daya dalam dokumen tata ruang;
2. Melakukan revitalisasi kawasan perikanan budi daya sebagai model penerapan perikanan budi daya produktif dan berkelanjutan;
3. Membangun kawasan budi daya terintegrasi khususnya di Indonesia Timur dan lokasi potensial lainnya sebagai pusat pertumbuhan baru bagi industri perikanan;
4. Membangun modeling kawasan produksi budi daya berbasis komoditas unggulan; dsb.

2.2. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, Direktorat Rumput Laut memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu: (1) Terkelolanya sistem perikanan budi daya rumput laut; dan (2) Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Direktorat Rumput laut.

Pada sasaran kegiatan terkelolanya sistem perikanan budi daya rumput laut, terdiri atas 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU), yaitu:

1. Infrastruktur kawasan budi daya rumput laut – *‘Ocean for prosperity – infrastructure for coral reef areas’*;
2. Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat;
3. Unit budi daya rumput laut yang dibina penerapan sertifikasi perikanan budi daya (CBIB); dan
4. Kebijakan tata kelola bidang budi daya rumput laut.

Sasaran kegiatan terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Direktorat Rumput laut, terdiri atas 7 (tujuh) indikator kinerja manajerial (IKM), antara lain:

1. Nilai PM SAKIP satker Direktorat Rumput Laut;
2. Indeks profesionalitas ASN satker Direktorat Rumput Laut;
3. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut;
4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker Direktorat Rumput Laut;
5. Persentase layanan perkantoran;
6. Nilai pengawasan kearsipan internal satker Direktorat Rumput Laut; dan
7. Persentase penyelesaian identifikasi SOP satker Direktorat Rumput Laut.

2.3. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, serta kebijakan pembangunan budi daya nasional.

Direktorat Rumput Laut sebagai salah satu unit eselon II di bawah naungan Ditjen Perikanan Budi Daya memiliki peran dalam peningkatan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan subsektor rumput laut di Indonesia. Oleh karena itu, penetapan perjanjian kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2025 disusun dengan pendekatan SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound*)

untuk menjamin bahwa setiap target yang ditetapkan bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Adapun indikator kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 2.1.



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nono Hartanto**
Jabatan : **Direktur Rumput Laut**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Rumput Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nono Hartanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT RUMPUT LAUT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	1.	Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas (Unit)	1
		2.	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat (kg)	14.619
		3.	Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB) (Unit)	14
		4.	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut yang Disusun (Rekomendasi Kebijakan)	6
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut	5.	Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut (Nilai)	84
		6.	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut (indeks)	81
		7.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Rumput Laut (Persen)	100
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut (Persen)	85
		9.	Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	80
		10.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut (Nilai)	80
		11.	Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Rumput Laut (Persen)	100

DATA ANGGARAN:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	10.665.689.000
2.	Dukungan Manajerial	254.364.000
Total Anggaran Direktorat Rumput Laut Tahun 2025		10.920.053.000

Jakarta, 1 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Rumput Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nono Hartanto

Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2025

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Rumput Laut dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Rumput Laut dengan data pencapaian kinerjanya. Metode pengukuran kinerja berpedoman pada manual indikator kinerja atau manual IKU. Data yang dimasukan sebagai pencapaian kinerja harus diverifikasi oleh Tim Kinerja, sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat yakni dari unit kerja pemilik kegiatan.

Pengukuran capaian indikator kinerja Direktorat Rumput Laut tahun 2025, menggunakan aplikasi Kinerjaku dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan/ semesteran/ tahunan).
2. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; dan juga diukur melalui aplikasi kinerjaku.kkp.go.id;
3. Status capaian indikator kinerja utama (IKU) yang ada dalam aplikasi kinerjaku.kkp.go.id ditunjukkan dengan warna:
 - a. Biru (untuk indikator dengan rentang nilai 110-120 atau Istimewa);
 - b. Hijau (untuk indikator dengan rentang nilai 90-<110 atau baik);
 - c. Kuning (untuk indikator dengan rentang nilai 70-<90 atau cukup);
 - d. Merah (untuk indikator dengan rentang nilai 50-<70 atau kurang);
 - e. Hitam (untuk indikator dengan rentang nilai <50 atau sangat kurang); dan
 - f. Abu-abu (untuk indikator yang belum ada penilaian).

Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi *Maximize*, *Minimize*, dan *Stabilize*.

1. *Maximize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.

2. *Minimize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik.

3. Stabilize

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu IKU yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan penerapan Aplikasi "Kinerjaku", capaian NKO Direktorat Rumput Laut tahun 2025 sebesar 108,37 seperti terlihat dalam gambar 2.2.



Gambar 2.2. NKO Direktorat Rumput Laut Tahun 2025

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas capaian organisasi Direktorat Rumput Laut, yang menjadi indikator utama sebanyak 4 indikator kinerja utama dan 7 indikator kinerja manajerial dengan rincian seperti disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Rumput Laut

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET Tahun 2025	CAPAIAN 2025
1	Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - <i>'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas'</i> (Unit)	1	1
2	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat (kg)	14.619	16.850
3	Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB) (Unit)	14	378
4	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut (Rekomendasi Kebijakan)	6	9
5	Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut (Nilai)	84	85,20
6	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut (indeks)	81	83,26
7	Persentase penyelesaian Temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut (%)	100	100
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut (%)	85	94,59
9	Persentase Layanan Perkantoran (%)	80	100
10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut (Nilai)	80	73,52
11	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut (%)	100	100

3.2. Analisis Kinerja

3.2.1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut

3.2.1.1. Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - *'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas'*

Program *Oceans for Prosperity Project* - LAUTRA atau Program Lautan Sejahtera bertujuan untuk memperkuat ketahanan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui peningkatan pengelolaan kawasan konservasi laut termasuk ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove serta mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan. Program ini juga mendorong pengembangan

peluang ekonomi masyarakat lokal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam di sektor perikanan, pariwisata, dan budi daya perairan yang berkelanjutan, serta memperkuat membangun kapasitas pemerintah dalam memobilisasi pembiayaan yang berkelanjutan untuk mendukung berbagai inisiatif tersebut.

Kegiatan dalam komponen 2 Program LAUTRA dilaksanakan untuk memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap menjaga prinsip keberlanjutan dan konservasi. Kegiatan teknis komponen 2 LAUTRA dalam pelaksanaannya harus mematuhi dan menerapkan prinsip keselamatan sosial dan keselamatan lingkungan.

Kegiatan komponen 2 LAUTRA dilakukan antara lain dalam hal pendekatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan yaitu melalui kegiatan (1) Fasilitasi pembangunan dan penguatan infrastruktur publik desa sesuai dengan daya dukung kawasan konservasi; (2) Penyediaan prasarana sarana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal; dan (3) Penguatan kelembagaan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah/UPT. Penguatan sarana dan prasarana juga menjadi bagian penting dari Komponen 2, yang tidak hanya akan dikelola oleh lembaga usaha masyarakat dan pemerintah desa, tetapi juga oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta pemerintah kabupaten/kota pesisir. Kolaborasi lintas pihak ini bertujuan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia benar-benar mendukung pengembangan usaha masyarakat secara optimal dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas pihak ini juga diarahkan untuk membangun hulu hilir produk kelautan dan perikanan agar bernilai tambah tinggi dan kompetitif di pasar.

Permasalahan utama dalam budi daya rumput laut terkait bibit adalah ketersediaan bibit berkualitas rendah dan terbatasnya bibit unggul hasil kultur jaringan. Pembudi daya sering menggunakan bibit dari hasil budi daya sebelumnya, yang rentan terhadap penyakit dan penurunan kualitas. Selain itu, ada juga masalah ketergantungan pada bibit alami dan kurangnya pemahaman tentang teknik kultur jaringan.

Pengembangan bibit rumput laut melalui kultur jaringan dapat menghasilkan bibit unggul dengan pertumbuhan dan ketahanan yang lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, melalui program LAUTRA Komponen 2 akan dilaksanakan kegiatan pengembangan laboratorium kultur jaringan dan sarana budi daya rumput laut di UPT

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk mendukung peremajaan bibit rumput laut di kawasan konservasi LAUTRA.

Kegiatan Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - '*Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas*' pada tahun 2025 terdiri dari komponen kegiatan: (1) Pengembangan Laboratorium Kultur Jaringan dan Sarana Budi Daya Rumput Laut; (2) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis budi daya rumput laut; dan (3) Pendampingan teknis Cara Budi Daya Rumput Laut yang Baik untuk stakeholder budi daya rumput laut di lokasi LAUTRA, dengan capaian sebagaimana tabel 3.4.

Tabel 3.2. Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - '*Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas*' Tahun 2025

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut								
IKU: Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - ' <i>Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas</i> '								
Realisasi Tahun 2021-2024				Tahun 2025			Pertumbuhan 2024-2025	Rata-rata Pertumbuhan 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target (unit)	Realisasi (unit)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%	N/A	N/A

Pada tahun 2025 Indikator Kinerja Utama (IKU) Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - '*Oceans for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas*' memiliki target 1 (satu) unit dengan alokasi anggaran LAUTRA untuk Komponen 2 senilai Rp10.000.000.000, namun terdapat blokir sebesar Rp5.652.100.000, sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp4.347.900.000. Realisasi serapan anggaran pelaksanaan kegiatan LAUTRA tahun 2025 adalah Rp4.347.159.510 atau 99,98% dari total anggaran.

Berdasarkan tabel 3.4., realisasi kegiatan LAUTRA tahun 2025 adalah 1 (satu) unit atau 100% dengan rincian kegiatan yaitu pengadaan bahan kimia dan operasional serta pengadaan peralatan laboratorium kultur jaringan rumput laut, pengadaan starter bibit rumput laut kultur jaringan, dan pengadaan sarana budi daya rumput laut di Provinsi NTB, Sulawesi Selatan dan Maluku. Selain itu, anggaran juga terserap untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi lokasi potensial budi daya rumput laut serta kegiatan sosialisasi, temu lapang, pendampingan teknis budi daya rumput laut di Provinsi NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku.



Gambar 3.1. Identifikasi Lokasi Potensial Budi Daya Rumput Laut di (a) Kab. Sumba Timur; (b) Kab. Sumba Barat; (c) Kab. Sabu Raijua; dan (d) Kab. Banggai Kepulauan

Rincian pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan Bahan Kimia dan Operasional Laboratorium di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar, Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon dan Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok;
2. Pengadaan Peralatan Laboratorium Kultur Jaringan di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar, Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon dan Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok;
3. Pengadaan Starter Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan (Kalus, Mikropropagul) di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar, Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon dan Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok, dan
4. Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut di Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon dan Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok.

Secara umum kendala terkait kegiatan pengembangan laboratorium kultur jaringan dan sarana budi daya rumput laut adalah adanya satu kegiatan yang memerlukan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan yaitu pengadaan bahan kimia dan operasional laboratorium kultur jaringan di BPBL Ambon.

Tindak lanjut dari rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengadaan yang telah selesai dan melakukan pemantauan kepada UPT (BPBL Lombok, BPBL Ambon, BPBAP Takalar) terkait pemanfaatan barang-barang yang telah diterima dan keberlanjutan pengembangan budi daya rumput laut kultur jaringan agar mencapai target produksi bibit rumput laut untuk rencana distribusi di lokasi LAUTRA.

3.2.1.2. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat

Rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan dan prioritas andalan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program bantuan bibit rumput laut kultur jaringan menjadi program yang dilaksanakan guna mendukung peningkatan produksi rumput laut nasional. Selain itu, program bantuan bibit rumput laut kultur jaringan juga dapat meningkatkan kualitas rumput laut di masyarakat. Program bantuan ini dilatarbelakangi bahwa saat ini masyarakat masih menggunakan sumber bibit lokal yang merupakan bibit dengan generasi cukup lama sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas dan hasil produksi. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan bibit rumput laut yang berkualitas, tahan penyakit, cepat tumbuh dan selalu tersedia sepanjang musim. Oleh karena itu, kebutuhan bibit yang berkualitas sangat dibutuhkan pembudi daya, diantaranya dilakukan melalui teknologi kultur jaringan pada penyediaan bibit rumput laut. Bibit rumput laut hasil kultur jaringan ini memiliki keunggulan yaitu tumbuh lebih cepat dan memiliki ketahanan terhadap penyakit yang lebih tinggi. Bibit rumput laut kultur jaringan diproduksi di laboratorium dengan menghasilkan planlet yang merupakan individu baru hasil kultur jaringan.

Program bantuan ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 289 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 297 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Bibit Rumput Laut Tahun Anggaran

2025. DJPB melalui unit pelaksana teknisnya telah mengembangkan bibit rumput laut kultur jaringan yang memiliki daya tahan terhadap kondisi lingkungan yang lebih baik serta laju pertumbuhan yang relatif cepat.

Penghitungan indikator kinerja ini yaitu jumlah bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan program bantuan bibit rumput laut kultur jaringan adalah menstimulus kegiatan pembudidayaan rumput laut dalam mendukung peningkatan produksi perikanan budi daya. Sedangkan sasaran kegiatan ini adalah pembudi daya rumput laut yang memenuhi persyaratan.

Bantuan bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat dari 6 (enam) UPT DJPB, yaitu BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, BPBAP Takalar, BBPBL Lampung, BPBL Ambon, dan BPBL Lombok.

Pada tahun 2025, terdapat efisiensi anggaran yang semula Rp. 2.625.000.000 menjadi Rp. 891.041.000 dengan realisasi anggaran bantuan bibit rumput laut tahun 2025 senilai Rp. 852.136.573 atau 95,63%. Perubahan alokasi anggaran tersebut berdampak pada perubahan target yang semula 37.500 kg menjadi 14.619 kg.

Tabel 3.3. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat Tahun 2025

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut									
IKU: Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat									
Realisasi Tahun 2021-2024				Tahun 2025			Pertumbuhan 2024-2025	Rata-rata Pertumbuhan 2021-2025	
2021	2022	2023	2024	Target (kg)	Realisasi (kg)	% Capaian			
N/A	N/A	N/A	119%	14.619	16.850	115,26%	-3,14	-3,14	

Berdasarkan tabel 3.3., target bantuan bibit yang akan disalurkan ke masyarakat di tahun 2025 sebanyak 14.619 kg dengan capaian tahun 2025 sebesar 16.850 kg atau 115,26%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, pertumbuhan 2024-2025 sebesar -3,14.

Kelompok penerima bantuan bibit rumput laut berlokasi di Kab Seram Bagian Barat 500 Kg, Kota Tual 1.000 Kg, Pulau Morotai 1.050 Kg, Pulau Taliabu 630 Kg, Kab Lombok Timur 2.000 Kg, Kab Luwu Timur 20 Kg, Kab. Alor 300 Kg, Kab. Lembata (300 Kg), Kab. Lombok Timur, NTT 160 Kg, Kab. Bantaeng 1.000 Kg, Kab Takalar 2.300 Kg, Kab. Poso 320 Kg, Kab. Pinrang 250 Kg, Kab. Sumenep 1.500 Kg, Kab. Jepara 1.000 Kg), dan Kab. Indramayu 2.120 Kg dan Kota Batam 2.400 Kg.



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

Gambar 3.2. Penyaluran Bantuan Bibit Rumput Laut kepada Masyarakat oleh UPT DJPB di (a) Kota Tua; (b) Kab.Lombok Timur; (c) Kab. Pinrang; (d) Kota Batam; dan (e) Kab. Sumenep

Kelompok penerima bantuan melakukan budi daya rumput laut dengan metode *longline* atau metode tancap atau lepas dasar. Komoditas terbanyak yang disalurkan adalah *Kappaphycus alvarezii*, selain itu ada pula varietas lainnya seperti Sakul dan *Gracillaria*.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan bantuan bibit rumput laut, diantaranya: (1) Kesulitan untuk mendapatkan bibit pasca musim kemarau; (2) Lokasi distribusi cukup jauh dari kebun bibit terdekat; (3) Adanya musim hama penyu dan ikan; (4) Cuaca ekstrem yang mengakibatkan penurunan kualitas thallus (rapuh dan pucat); (5) Keterbatasan sarana budi daya pendukung seperti tali ris; dan (6) Kendala geografis (lokasi penerima bantuan) dan akses komunikasi di wilayah remote.

Rencana tindak lanjut kegiatan bantuan bibit pada tahun berikutnya, antara lain: (1) Peningkatan produksi planlet, mikropopagul, dan kalus yang merupakan tahapan-tahapan sebelum planlet; (2) Percepatan CPCL; (3) Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, UPT, dan penyuluh perikanan; (4) UPT pelaksana melakukan optimalisasi distribusi bantuan; (5) Pembinaan kebun bibit lokal oleh UPT pelaksana kepada kelompok penerima; dan (6) Evaluasi dan Pelaporan.

3.2.1.3. Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB)

Rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan perikanan budi daya yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya bagi masyarakat pesisir. Permintaan pasar terhadap produk rumput laut, baik untuk kebutuhan industri pangan, farmasi, maupun kosmetik, terus meningkat dan menuntut jaminan mutu, keamanan pangan, serta keberlanjutan proses produksi. Kondisi tersebut menuntut unit budi daya rumput laut untuk menerapkan praktik budi daya yang baik, bertanggung jawab, dan berstandar.

Setiap unit budi daya rumput laut diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip CBIB, dimana hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa rumput laut yang dihasilkan telah sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan. Berdasarkan Permen KP No. 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik, yang disebut Cara Pembesaran Ikan yang Baik adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan. Cara Pembesaran Ikan yang Baik disebut juga sebagai Cara Budi Daya Ikan yang Baik.

Pada kenyataannya, sebagian unit budi daya rumput laut masih menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan standar CBIB secara optimal, seperti keterbatasan pemahaman terhadap persyaratan sertifikasi, belum tertibnya pencatatan usaha, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung budi daya. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan unit budi daya rumput laut dalam penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB) menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha, mendorong kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, serta memastikan praktik budi daya yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, terjadi perubahan tugas dan fungsi dalam kelembagaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan sertifikasi CBIB yang semula ditangani oleh Ditjen Perikanan Budi Daya saat ini dilaksanakan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (BP2MHKP), sedangkan Ditjen Perikanan Budi Daya bertugas melakukan pembinaan kepada pembudi daya. Hal ini tertuang lebih jelas pada Permen KP No. 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dimana kegiatan pelaksanaan dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang dalam hal ini termasuk sertifikasi CBIB dilakukan oleh otoritas kompeten yang dalam pelaksanaan tugasnya Menteri KP menunjuk Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sebagai manajer puncak.

Adapun pengaturan tentang kewenangan pembinaan dan pengendalian dalam rangka penerbitan sertifikat diatur dalam Permen KP No. 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Melalui kegiatan pembinaan ini, diharapkan unit budi daya rumput laut mampu memahami dan menerapkan seluruh prinsip CBIB secara konsisten, sehingga menghasilkan produk rumput laut yang bermutu, aman, ramah lingkungan, serta memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi. Selain itu, pembinaan penerapan CBIB juga diharapkan dapat mendukung kebijakan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha budi daya rumput laut.

Pelaksanaan pembinaan penerapan CBIB diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 463 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Penerapan Mutu Pembudidayaan Ikan. Berdasarkan Kepdirjen tersebut, pembinaan CBIB dilaksanakan melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi. Pada tahun 2025, kegiatan pembinaan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi merupakan kegiatan memperkenalkan dan memberikan pemahaman CBIB kepada Pelaku Usaha dan/atau pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan karena selama ini pemahaman terkait CBIB untuk komoditas rumput laut jarang dilaksanakan, sehingga berdasarkan informasi dari Dinas yang membidangi Perikanan, banyak pelaku usaha bahkan dari Dinas dan penyuluh belum mengetahui terkait CBIB rumput laut.

Pada tahun 2025, target unit budi daya rumput laut yang dibina penerapan sertifikasi perikanan budi daya (CBIB) oleh Direktorat Rumput Laut sebanyak 14 unit pembudi daya rumput laut dengan dukungan anggaran sebesar Rp14.000.000. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan tersebut menghadapi kendala berupa kebijakan efisiensi anggaran berupa blokir 100%, sehingga anggaran pembinaan CBIB tidak dapat direalisasikan. Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Meskipun tidak didukung oleh anggaran khusus CBIB, Direktorat Rumput Laut tetap melakukan upaya adaptif untuk memastikan keberlanjutan pembinaan melalui kegiatan sosialisasi CBIB. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui *Zoom Meeting*, serta secara luring dengan memanfaatkan anggaran dari Program *Oceans for Prosperity Project* - LAUTRA atau Program Lautan Sejahtera.

Pada tahun 2025, kegiatan LAUTRA untuk Komponen 2, antara lain: (1) Identifikasi pembangunan kawasan budi daya rumput laut di wilayah LAUTRA; (2) Pengembangan laboratorium kultur jaringan dan sarana budi daya rumput laut di UPT DJPB; (3) Sosialisasi dan bimbingan teknis CBIB di wilayah LAUTRA; dan (4) Pendampingan teknis untuk stakeholder budi daya rumput laut di wilayah LAUTRA. Sehingga, kegiatan sosialisasi CBIB yang dilaksanakan secara luring pada tahun 2025 merupakan salah satu wujud nyata dukungan Program LAUTRA dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui peningkatan kapasitas dan pembinaan mutu pembudidayaan ikan. Strategi pemanfaatan kegiatan lintas program ini menunjukkan fleksibilitas pelaksanaan

kegiatan serta komitmen unit kerja dalam menjaga capaian kinerja di tengah keterbatasan anggaran.

Tabel 3.4. Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut								
IKU: Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya								
Realisasi Tahun 2021-2024				Tahun 2025			Pertumbuhan 2024-2025	Rata-rata Pertumbuhan 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target (unit)	Realisasi (unit)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	14	378	2.700%	N/A	N/A

Berdasarkan tabel di atas, realisasi unit budi daya rumput laut yang dibina penerapan sertifikasi perikanan budi daya (CBIB) oleh Direktorat Rumput Laut pada tahun 2025 sebanyak 378 unit atau sebesar 2.700% dari target tahun 2025 yang ditetapkan sebanyak 14 unit dengan rincian sebagai berikut:

- Sosialisasi pembinaan CBIB rumput laut secara daring melalui zoom meeting (Tahap 1) dengan subtotal peserta sebanyak 28 unit yang dilaksanakan tanggal 12 Agustus 2025. Peserta pembudi daya rumput laut tersebut berasal dari Gresik (4 Unit), Pekalongan (1 unit), Kendal (1 unit), Brebes (1 unit), Subang (1 unit), Sumenep (5 unit), Jepara (2 unit), Cirebon (1 unit), Serang (7 unit), Sampang (1 unit), Demak (1 unit), Situbondo (2 unit), Bekasi (1 unit);
- Sosialisasi pembinaan CBIB rumput laut (Tahap 2) secara luring atau tatap muka di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan subtotal peserta sebanyak 200 unit yang dilaksanakan di Kabupaten Kupang (100 unit) pada tanggal 8 Oktober 2025 dan Kabupaten Rote Ndao (100 unit) pada tanggal 9 Oktober 2025;
- Sosialisasi pembinaan CBIB rumput laut (Tahap 3) secara luring atau tatap muka di Provinsi Sulawesi Selatan dengan subtotal peserta sebanyak 150 unit yang dilaksanakan di Kabupaten Pangkep (75 unit) pada tanggal 26 November 2025 dan Kabupaten Takalar (75 unit) pada tanggal 27 November 2025.



(a)



(b)



(c)



(d)

Gambar 3.3. Sosialisasi pembinaan CBIB rumput laut di (a) Kab. Kupang; (b) Kab. Rote Ndao; (c) Kab. Takalar; dan (d) Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Capaian ini mengindikasikan bahwa pendekatan sosialisasi massal, baik secara daring maupun luring, mampu menjangkau pembudi daya dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan skema pembinaan reguler berbasis anggaran khusus. Namun demikian, capaian yang melampaui target tersebut perlu dicermati lebih lanjut, khususnya terkait perbedaan karakter antara pembinaan intensif dan sosialisasi umum, serta implikasinya terhadap kualitas penerapan CBIB di tingkat pembudi daya.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan penerapan Sertifikasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) rumput laut pada tahun 2025 antara lain adanya kebijakan efisiensi anggaran berupa blokir anggaran sebesar 100% sehingga alokasi anggaran pembinaan CBIB tidak dapat direalisasikan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga berimplikasi pada terbatasnya kegiatan pembinaan dan pendampingan lapangan secara berkelanjutan, monitoring penerapan standar CBIB, serta fasilitasi proses sertifikasi secara formal. Di sisi lain, pelaksanaan sosialisasi secara massal, baik daring maupun luring, meskipun berhasil menjangkau jumlah pembudi daya yang besar, memiliki keterbatasan dalam menjamin kedalaman pemahaman dan konsistensi penerapan CBIB di tingkat unit usaha pembudi daya.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Rumput Laut perlu terus mengoptimalkan sinergi lintas program dan sumber pendanaan, seperti pemanfaatan Program LAUTRA, untuk mendukung kegiatan pembinaan CBIB secara berkelanjutan. Ke depan, diperlukan penguatan strategi pembinaan berjenjang, yaitu dengan mengombinasikan sosialisasi massal sebagai tahap awal peningkatan pemahaman dengan pendampingan intensif dan terfokus bagi unit pembudi daya terpilih yang siap

menuju sertifikasi CBIB. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja agar tidak hanya menekankan capaian kuantitatif jumlah unit yang dibina, tetapi juga mempertimbangkan aspek kualitas penerapan CBIB dan tingkat keberhasilan sertifikasi. Penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, UPT DJPB, serta pemangku kepentingan terkait juga perlu ditingkatkan guna mendukung monitoring, evaluasi, dan pendampingan lapangan, sehingga implementasi CBIB pada budi daya rumput laut dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan meskipun di tengah keterbatasan anggaran.

3.2.1.4. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut

Rumput laut merupakan komoditas unggulan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap ekonomi pesisir, ekspor, dan kesejahteraan masyarakat pembudi daya. Namun, pengembangan rumput laut dihadapkan pada tantangan tata kelola yang kompleks, termasuk aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Oleh karena itu, kebijakan tata kelola yang efektif dan berkelanjutan menjadi sangat penting.

Yang dimasukd dalam indikator kinerja ini adalah laporan penyusunan dokumen kebijakan tata kelola bidang budi daya rumput laut. Dokumen kebijakan ini antara lain berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria atau sering disebut NSPK. NSPK yaitu petunjuk atau pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan, sehingga NSPK bidang budi daya rumput laut merupakan suatu petunjuk atau pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dibidang budi daya rumput laut. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan kegiatan bidang budi daya rumput laut. Standar merupakan acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan kegiatan budi daya rumput laut. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan kegiatan bidang budi daya rumput laut. Sedangkan, kriteria merupakan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kegiatan budi daya rumput laut.

Tabel 3.5. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut Tahun 2025

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut								
IKU: Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut								
Realisasi Tahun 2021-2024				Tahun 2025			Pertumbuhan 2024-2025	Rata-rata Pertumbuhan 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target (rekomendasi kebijakan)	Realisasi (rekomendasi kebijakan)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	6	9	150%	N/A	N/A

Indikator kinerja ini mengukur jumlah dokumen kebijakan berupa penerbitan NSPK atau kebijakan-kebijakan lain terkait bidang budi daya rumput laut dengan target pada tahun 2025 sebanyak 6 dokumen. Pengukuran IKU dilaksanakan di akhir tahun, namun perkembangan penyusunan dilaporkan setiap triwulan. Adapun dokumen tata kelola bidang budi daya rumput laut yang telah dihasilkan dan progress kegiatan tahun 2025 antara lain:

1) Petunjuk Teknis Bantuan Bibit Rumput Laut

Kegiatan bantuan bibit rumput laut dari Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya kepada pembudi daya rumput laut menjadi salah satu program pada Direktorat Rumput Laut. Guna kelancaran kegiatan ini, Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 289 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 297 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Bibit Rumput Laut Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan pada triwulan II yang lalu. Petunjuk ini digunakan sebagai acuan oleh Unit Pelaksana Teknis lingkup DJPB (BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, BPBAP Takalar, BBPBL Lampung, BPBL Ambon, dan BPBL Lombok), Dinas Perikanan yang membidangi perikanan budi daya, penyuluh perikanan, pembudi daya, serta stakeholder lainnya dalam melaksanakan kegiatan bantuan bibit rumput laut.

2) RSNI3 9414-1:2025 (Rumput laut kotoni (*Kappaphycus alvarezii*) hasil kultur jaringan – Bagian 1: Produksi mikropopagul

Kappaphycus alvarezii merupakan salah satu jenis rumput laut penghasil karagenan yang memiliki nilai ekonomi strategis bagi Indonesia, baik untuk kebutuhan industri domestik maupun ekspor. Sebagai salah satu negara penghasil rumput laut tersebar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan produksi dan pengembangan komoditas ini. Namun, sistem perbanyak vegetatif yang umum digunakan dalam budi daya *Kappaphycus alvarezii* telah menyebabkan penurunan kualitas bibit, kerentanan terhadap penyakit, serta degradasi secara akumulatif.

Penyusunan standar ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang baku, terukur, dan dapat diterapkan secara konsisten oleh laboratorium kultur jaringan, instansi penelitian, pelaku industri perbenihan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Pada bulan Desember 2025, Badan Standardisasi Nasional menyampaikan bahwa RSNI3 dapat ditingkatkan menjadi RSNI4, untuk dilanjutkan ke tahap validasi RASNI dan diproses penetapan SNI sesuai ketentuan.

3) RSNI3 9414-2:2025 (Rumput laut kotoni (*Kappaphycus alvarezii*) hasil kultur jaringan – Bagian 2: Produksi planlet)

Rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan subsektor perikanan budi daya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam ekspor produk hasil perikanan. Salah satu jenis rumput laut yang banyak dibudidayakan adalah *Kappaphycus alvarezii*, yang dikenal sebagai penghasil utama karagenan, yaitu bahan baku penting dalam industri pangan, farmasi, kosmetik, dan tekstil.

Selama ini, pembibitan rumput laut masih bergantung pada teknik perbanyakan vegetatif konvensional yang memiliki beberapa kendala, antara lain: penurunan kualitas genetik, kerentanan terhadap penyakit, dan produktivitas yang tidak stabil. Untuk mengatasi tantangan tersebut, teknologi kultur jaringan telah dikembangkan sebagai alternatif perbanyakan bibit unggul yang lebih efisien, steril, dan seragam.

Standar ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang baku, terukur, dan dapat diterapkan secara konsisten oleh laboratorium kultur jaringan, instansi penelitian, pelaku industri perbenihan, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya standar ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi bibit rumput laut berkualitas, mendukung program nasional perbenihan rumput laut, serta memperkuat daya saing industri rumput laut Indonesia di tingkat global.

Pembahasan RSNI3 belum dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan waktu pelaksanaan yang relatif singkat. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran, sehingga Direktorat Rumput laut mendapatkan dukungan dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk proses pembahasan RSNI karena termasuk komoditas penting dan program prioritas. Akibatnya, ruang diskusi, pendalaman materi teknis, serta penyelarasan masukan dari para pemangku kepentingan dirasa belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan mendalam sesuai dengan kebutuhan penyusunan standar yang komprehensif. Setelah melalui pembahasan rapat konsensus, maka tahapan selanjutnya adalah jajak pendapat dengan jangka waktu 1 (satu) bulan guna mendapatkan tanggapan atau masukan dari Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN).

Sebagai rencana tindak lanjut pada tahun 2026, akan dilaksanakan pembahasan pada awal tahun dalam rangka penyusunan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) tahun 2026. Selain itu, memastikan usulan RSNI bidang rumput laut lolos dari tahapan jajak pendapat dan mendapatkan penetapan sebagai SNI.

4) Laporan Survei Modeling Rumput Laut di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kabupaten Bima merupakan salah satu wilayah pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki potensi cukup besar untuk pengembangan budidaya rumput laut. Secara geografis, Kabupaten Bima memiliki garis pantai yang menghadap ke perairan Laut Flores dan Teluk Bima, dengan karakteristik perairan relatif tenang di beberapa lokasi pesisir sehingga mendukung kegiatan budi daya laut.

Berdasarkan hasil survei lapangan, lokasi budi daya rumput laut yang ditinjau di Kabupaten Bima berada di Desa Laju, Kecamatan Langgudu. Kondisi perairan pada lokasi tersebut secara umum masih mendukung pertumbuhan rumput laut, dengan parameter kualitas air seperti suhu, salinitas, dan kecerahan yang berada dalam kisaran toleransi untuk budi daya. Namun demikian, terdapat tantangan berupa fluktuasi kondisi lingkungan musiman serta pengaruh aktivitas pesisir yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan budi daya ke depan.

Dari aspek teknis, sistem budi daya yang diterapkan oleh pembudi daya masih didominasi metode konvensional dengan tingkat produktivitas yang belum optimal. Ketersediaan sarana dan prasarana budi daya relatif terbatas, terutama terkait peralatan pascapanen dan penanganan hasil. Selain itu, ketergantungan terhadap bibit dari luar lokasi menjadi salah satu faktor pembatas keberlanjutan produksi.

Ditinjau dari aspek ekonomi, budi daya rumput laut di Kabupaten Bima masih berperan sebagai sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat pesisir. Sistem pemasaran umumnya dilakukan melalui pedagang pengumpul, sehingga posisi tawar pembudi daya relatif lemah dan nilai tambah di tingkat lokal masih rendah. Meskipun demikian, potensi peningkatan pendapatan cukup terbuka apabila didukung oleh penguatan kelembagaan, perbaikan mutu produk, serta akses pasar yang lebih luas.

Dari sisi sosial dan kelembagaan, masyarakat pembudi daya memiliki pengalaman dan minat yang cukup tinggi terhadap budi daya rumput laut. Namun,

peran kelompok pembudi daya dan dukungan kelembagaan masih perlu diperkuat, terutama dalam hal manajemen usaha, akses permodalan, serta pendampingan teknis berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil analisis kelayakan menunjukkan bahwa Kabupaten Bima memiliki potensi untuk pengembangan budi daya rumput laut terintegrasi, dengan catatan diperlukan intervensi pada aspek teknis, ekologis, ekonomi, dan sosial-kelembagaan. Pengembangan budi daya rumput laut di Kabupaten Bima direkomendasikan untuk diarahkan pada peningkatan kualitas produksi, penguatan kelembagaan pembudi daya, serta penerapan konsep budi daya terintegrasi yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan usaha.

5) Laporan Survei Modeling Rumput Laut di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Survei lokasi modeling budi daya rumput laut di Kabupaten Dompu dilaksanakan di Desa Kwangko, Kecamatan Manggalewa. Kabupaten Dompu memiliki wilayah pesisir yang menghadap ke Laut Flores dan Samudra Indonesia, dengan karakteristik perairan yang beragam dan sebagian berpotensi untuk pengembangan budi daya laut. Lokasi survei berada pada kawasan pesisir yang relatif terlindung dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan budi daya rumput laut.

Hasil pengamatan kondisi biofisik perairan menunjukkan bahwa parameter kualitas air, seperti suhu, salinitas, kecerahan, dan arus, secara umum masih berada dalam kisaran yang sesuai untuk budi daya rumput laut. Tingkat keterlindungan lokasi dinilai cukup baik, meskipun terdapat pengaruh dinamika musim yang berpotensi memengaruhi stabilitas produksi. Dari aspek lingkungan, lokasi masih berada dalam batas daya dukung, namun diperlukan pengelolaan kepadatan dan praktik budi daya yang lebih baik untuk menjaga kualitas perairan secara berkelanjutan.

Dari aspek teknis, sistem budi daya rumput laut di Kabupaten Dompu masih didominasi oleh metode sederhana dan bersifat konvensional. Ketersediaan sarana dan prasarana budi daya, seperti tali, pelampung, dan jangkar, relatif terbatas dan sebagian masih bergantung pada modal mandiri pembudi daya. Produktivitas yang dihasilkan belum optimal dan masih berpotensi ditingkatkan melalui perbaikan teknik budi daya, penggunaan bibit bermutu, serta penerapan manajemen pemeliharaan yang lebih terstandar.

Secara ekonomi, budi daya rumput laut di Kabupaten Dompu berperan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat pesisir, meskipun sebagian besar masih bersifat usaha skala kecil. Struktur pemasaran hasil produksi umumnya melalui pedagang pengumpul, sehingga nilai tambah di tingkat pembudi daya masih rendah dan posisi tawar relatif lemah. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan rantai pasok, peningkatan kualitas pascapanen, serta akses pasar yang lebih luas untuk meningkatkan pendapatan pembudi daya.

Dari sisi sosial dan kelembagaan, masyarakat di lokasi survei memiliki pengalaman dalam kegiatan budi daya rumput laut dan menunjukkan minat yang cukup tinggi untuk mengembangkan usaha tersebut. Namun, peran kelembagaan kelompok pembudi daya masih perlu diperkuat, terutama dalam hal manajemen usaha, akses permodalan, serta pendampingan teknis. Berdasarkan analisis multiaspek (teknis, ekologis, ekonomi, dan sosial-kelembagaan), lokasi di Kabupaten Dompu dinilai cukup layak untuk dikembangkan sebagai bagian dari modeling budi daya rumput laut terintegrasi, dengan catatan diperlukan intervensi terarah untuk meningkatkan keberlanjutan dan kinerja usaha budi daya.

6) Laporan Survei Modeling Rumput Laut di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan survei lokasi modeling budi daya rumput laut terintegrasi di Kabupaten Sumbawa dilaksanakan di Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir. Kabupaten Sumbawa memiliki karakteristik wilayah pesisir yang strategis dengan garis pantai yang menghadap ke Laut Flores dan Samudra Hindia, serta didukung oleh potensi perairan pesisir yang relatif luas dan beragam. Kondisi geografis tersebut menjadikan Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu sentra utama produksi rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hasil survei menunjukkan bahwa kondisi biofisik perairan di lokasi kajian secara umum berada dalam kisaran yang sesuai untuk pengembangan budi daya rumput laut. Parameter kualitas perairan, seperti suhu, salinitas, kecerahan, dan arus, mendukung pertumbuhan rumput laut, dengan tingkat keterlindungan perairan yang relatif baik. Dari aspek lingkungan, aktivitas budi daya yang berlangsung masih berada dalam batas daya dukung perairan, meskipun diperlukan pengelolaan yang lebih terencana untuk mengantisipasi tekanan lingkungan akibat intensifikasi budi daya di masa mendatang.

Dari aspek teknis, sistem budi daya rumput laut di Kabupaten Sumbawa telah berkembang dan dilakukan secara cukup luas oleh masyarakat pesisir. Metode budi daya yang diterapkan pada umumnya masih bersifat konvensional, dengan tingkat produktivitas yang bervariasi antar lokasi. Ketersediaan sarana dan prasarana budi daya relatif memadai dibandingkan lokasi lain, namun masih terdapat keterbatasan pada aspek standardisasi bibit, penerapan teknologi budi daya yang lebih efisien, serta penanganan pascapanen untuk menjaga mutu hasil.

Ditinjau dari aspek ekonomi, budi daya rumput laut merupakan komoditas unggulan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat pesisir di Kabupaten Sumbawa. Namun demikian, sistem pemasaran hasil produksi masih didominasi oleh pola penjualan melalui pedagang pengumpul, sehingga nilai tambah di tingkat pembudi daya relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan rantai nilai, peningkatan mutu produk, serta pengembangan akses pasar dan industri pengolahan untuk meningkatkan daya saing komoditas rumput laut.

Berdasarkan hasil analisis indeks keberlanjutan menggunakan metode Raphfish, pengembangan budi daya rumput laut di Kabupaten Sumbawa menunjukkan tingkat keberlanjutan yang relatif baik secara multiaspek. Pada aspek teknis, keberlanjutan dipengaruhi oleh kesesuaian kondisi perairan dan pengalaman pembudi daya, dengan atribut pengungkit utama berupa metode budi daya, kualitas sarana prasarana, dan manajemen pemeliharaan. Aspek ekologis menunjukkan kondisi yang masih mendukung keberlanjutan, dengan faktor pengungkit utama terkait pengelolaan kepadatan budi daya dan potensi tekanan lingkungan. Aspek ekonomi memperlihatkan tingkat keberlanjutan yang cukup, namun masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga, struktur biaya produksi, dan keterbatasan akses pasar. Sementara itu, aspek sosial-kelembagaan menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan pembudi daya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan pendampingan dan kemitraan usaha.

Secara keseluruhan, hasil analisis Raphfish menempatkan Kabupaten Sumbawa sebagai lokasi yang layak dan berpotensi untuk pengembangan modeling budi daya rumput laut terintegrasi, dengan catatan bahwa peningkatan keberlanjutan ke depan memerlukan intervensi terarah pada atribut-atribut pengungkit utama, khususnya pada aspek ekonomi dan sosial-kelembagaan, guna memastikan pengembangan budi daya yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan.

7) Laporan Survei Modeling Rumput Laut di Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Survei di Kabupaten Buton Tengah dilaksanakan untuk mengidentifikasi potensi dan tingkat kesesuaian wilayah pesisir bagi pengembangan budi daya rumput laut secara berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup pengukuran parameter biofisik perairan, penilaian kondisi sosial-ekonomi dan kelembagaan pembudi daya, serta analisis spasial untuk penentuan lokasi prioritas. Hasil survei diharapkan menjadi dasar perumusan kebijakan dan perencanaan program pengembangan rumput laut di tingkat daerah.

Hasil survei menunjukkan bahwa perairan pesisir Kabupaten Buton Tengah, khususnya di Kecamatan Mawasangka, memiliki kondisi biofisik yang mendukung budi daya rumput laut. Parameter kualitas perairan seperti kedalaman, kecerahan, substrat dasar, dan kecepatan arus berada pada kisaran optimal untuk penerapan metode budi daya *longline*. Kondisi oseanografi relatif stabil pada musim timur, meskipun terdapat potensi gangguan gelombang dan penyakit rumput laut pada musim barat yang memerlukan strategi mitigasi teknis.



Gambar 3.4. Survei Lokasi Penjemuran di Kab. Buton Tengah

Dari sisi pemanfaatan ruang, Kabupaten Buton Tengah memiliki luasan perairan potensial yang cukup besar untuk pengembangan budi daya rumput laut, dengan sebagian area telah dimanfaatkan secara aktif oleh masyarakat pesisir. Namun demikian, tingkat produktivitas masih bervariasi dan belum optimal, terutama akibat keterbatasan ketersediaan bibit unggul, manajemen budi daya yang belum seragam, serta keterbatasan sarana pendukung pascapanen.

Secara sosial dan kelembagaan, pembudi daya rumput laut di Kabupaten Buton Tengah telah terorganisasi dalam kelompok-kelompok usaha yang cukup aktif,

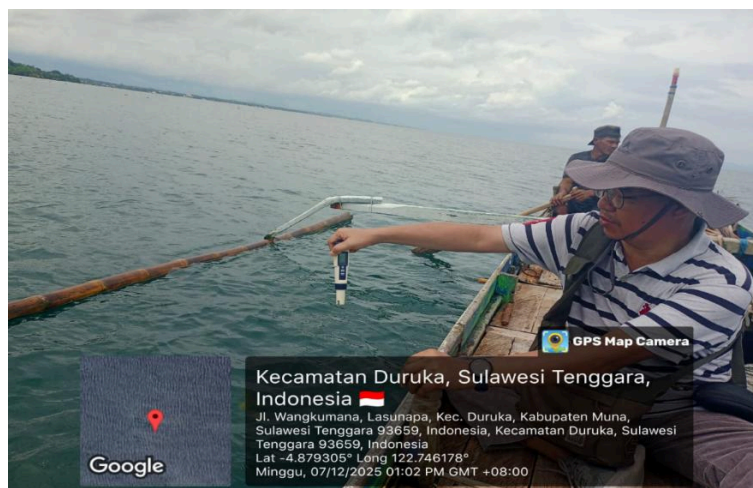
didukung oleh peran pemerintah daerah dan kelembagaan lokal. Aksesibilitas wilayah dan infrastruktur dasar relatif memadai, namun masih diperlukan penguatan pada aspek pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi.

Berdasarkan hasil analisis terpadu, Kabupaten Buton Tengah dinilai memiliki prospek yang baik untuk pengembangan budi daya rumput laut sebagai komoditas unggulan daerah. Pengembangan ke depan perlu difokuskan pada penyediaan bibit berkualitas, peningkatan kapasitas teknis pembudi daya, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha, serta penataan ruang dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan agar manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat pesisir.

8) Laporan Survei Modeling Rumput Laut di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kegiatan survei di Kabupaten Muna dilaksanakan untuk menilai potensi, tingkat kesesuaian, serta tantangan pengembangan budi daya rumput laut sebagai salah satu komoditas unggulan sektor kelautan dan perikanan. Kegiatan survei mencakup pengumpulan data biofisik perairan, analisis kondisi oseanografi, serta kajian aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan pembudi daya. Hasil survei ini menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi teknis dan kebijakan pengembangan budi daya rumput laut yang berkelanjutan di Kabupaten Muna.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian wilayah pesisir Kabupaten Muna memiliki kondisi perairan yang berada pada kategori sesuai hingga cukup sesuai untuk budi daya rumput laut, khususnya untuk komoditas *Kappaphycus alvarezii* dan *Eucheuma* sp. Parameter lingkungan seperti kedalaman perairan, kecerahan, dan kecepatan arus pada umumnya memenuhi persyaratan teknis budi daya. Namun demikian, variabilitas oseanografi yang relatif tinggi, terutama akibat pengaruh musim hujan dan dinamika perairan pesisir, berpotensi memengaruhi stabilitas produksi serta meningkatkan risiko serangan penyakit rumput laut pada periode tertentu.



Gambar 3.5. Survei Pengukuran Kualitas Air di Kab. Muna

Dari sisi pemanfaatan ruang dan produksi, Kabupaten Muna memiliki luasan perairan potensial yang cukup besar dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir secara turun-temurun. Meskipun demikian, tingkat produktivitas budi daya masih bervariasi dan cenderung belum optimal. Keterbatasan ketersediaan bibit unggul, praktik budi daya yang belum sepenuhnya mengikuti standar teknis yang dianjurkan, serta minimnya sarana pendukung pascapanen menjadi faktor pembatas utama dalam peningkatan hasil dan kualitas produksi.

Secara sosial dan kelembagaan, pembudi daya rumput laut di Kabupaten Muna memiliki pengalaman usaha yang relatif baik dan didukung oleh jumlah pelaku usaha yang cukup besar. Akan tetapi, penguatan kelembagaan ekonomi pembudi daya, akses terhadap pembiayaan, serta kemitraan usaha dengan sektor hilir masih perlu ditingkatkan. Infrastruktur pendukung pengolahan dan pemasaran juga belum berkembang optimal, sehingga nilai tambah hasil budi daya belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil survei tersebut, pengembangan budi daya rumput laut di Kabupaten Muna direkomendasikan dilakukan melalui pendekatan bertahap dan terintegrasi. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas dan ketersediaan bibit, penguatan kapasitas teknis dan manajemen usaha pembudi daya, penataan lokasi budi daya sesuai daya dukung lingkungan, serta penguatan kelembagaan dan infrastruktur hilir. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, ketahanan usaha terhadap risiko lingkungan, serta kontribusi sektor budi daya rumput laut terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

9) Laporan Survei Modeling Rumput Laut di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Survei di Kabupaten Muna Barat bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kelayakan wilayah pesisir dalam mendukung pengembangan budi daya rumput laut sebagai kegiatan ekonomi unggulan masyarakat pesisir. Pelaksanaan survei difokuskan pada penilaian karakteristik perairan, kesiapan lokasi budi daya, serta kondisi sosial dan kelembagaan pelaku usaha. Hasil kajian ini disusun sebagai bahan pertimbangan teknis dan strategis bagi pemerintah daerah dalam menetapkan arah pengembangan budi daya rumput laut yang terencana dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil survei, perairan pesisir Kabupaten Muna Barat menunjukkan karakteristik lingkungan yang relatif kondusif dan stabil untuk kegiatan budi daya rumput laut. Struktur perairan yang cenderung terlindung, dengan dinamika arus yang moderat dan kualitas perairan yang baik, memberikan kondisi tumbuh yang mendukung bagi komoditas rumput laut. Dibandingkan wilayah lain dalam cakupan survei, tingkat gangguan oseanografi di Kabupaten Muna Barat relatif lebih rendah, sehingga memberikan peluang keberlanjutan usaha dengan risiko lingkungan yang lebih terkendali.

Dari sisi pemanfaatan wilayah pesisir, Kabupaten Muna Barat telah berkembang sebagai salah satu pusat aktivitas budi daya rumput laut dengan pemanfaatan ruang yang cukup intensif. Produksi rumput laut di beberapa lokasi survei menunjukkan kestabilan hasil antar siklus, meskipun potensi peningkatan produktivitas masih terbuka melalui penerapan teknik budi daya yang lebih efisien dan dukungan input produksi yang berkualitas, terutama ketersediaan bibit yang terstandar.

Secara kelembagaan, pelaku usaha budi daya rumput laut di Kabupaten Muna Barat telah membangun pola kerja kelompok yang relatif solid, dengan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Kondisi ini didukung oleh aksesibilitas wilayah dan jaringan distribusi yang memadai. Namun demikian, aspek penguatan kelembagaan ekonomi, pengembangan skema pembiayaan, serta peningkatan fasilitas pascapanen dan pengolahan masih menjadi agenda penting untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk rumput laut daerah.

Secara keseluruhan, hasil survei menegaskan bahwa Kabupaten Muna Barat memiliki posisi strategis sebagai wilayah prioritas dalam pengembangan budi daya rumput laut. Upaya pengembangan selanjutnya perlu diarahkan pada pengelolaan

lokasi budi daya berbasis daya dukung lingkungan, penguatan kapasitas teknis dan manajerial pembudi daya, serta integrasi pengembangan hulu–hilir. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan usaha, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kontribusi sektor rumput laut terhadap pembangunan ekonomi pesisir Kabupaten Muna Barat secara berkelanjutan.



Gambar 3.6. Survei Lokasi Budi Daya Rumput Laut Eksisting di Kab. Muna Barat

Berdasarkan uraian kebijakan tata kelola bidang budi daya rumput laut yang telah dihasilkan pada tahun 2025 di atas, telah tersusun 9 rekomendasi kebijakan atau 150% realisasi dari target 6 rekomendasi kebijakan. Adapun realisasi anggaran untuk kegiatan kebijakan tata kelola bidang budi daya rumput laut sebesar sebesar Rp.665.627.879 atau 99,99% telah terserap dari alokasi anggaran sebesar Rp.665.689.000.

Sentra lokasi budi daya rumput laut umumnya berada di wilayah yang bersifat terpencil (*remote area*), sehingga memerlukan biaya operasional serta waktu perjalanan yang cukup besar untuk menjangkaunya. Hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, terutama karena waktu yang tersedia untuk kegiatan lapangan relatif terbatas. Keterbatasan waktu tersebut berdampak pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan, termasuk pengumpulan data, koordinasi dengan pelaku usaha, serta pelaksanaan pendampingan teknis di lokasi budi daya. Sehingga pada tahun 2026 diharapkan terlaksananya kegiatan inventarisasi dan identifikasi sentra budi daya rumput laut secara lebih sistematis dengan memanfaatkan data eksisting yang tersedia serta didukung oleh pelaksanaan studi lapang. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemetaan sentra budi daya yang lebih akurat dan terkini, sebagai dasar dalam penentuan prioritas lokasi, perumusan kebijakan, serta

penyusunan standar dan program pengembangan budi daya rumput laut yang berkelanjutan pada tahun 2026.

3.2.2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut

3.2.2.1. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut merupakan indikator kinerja yang targetnya bersifat tahunan dan pencapaiannya dihitung di akhir tahun berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Jenderal dengan mekanisme berdasarkan pada Permen PAN RB.

Tabel 3.6. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut Tahun 2025

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut								
IKU: Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut								
Realisasi Tahun 2021-2024				Tahun 2025			Pertumbuhan 2024-2025	Rata-rata Pertumbuhan 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	% Capaian		
N/A	N/A	64,05	82,80	84	85,20	101,43%	2,90	16,09

Realisasi nilai PM SAKIP Direktorat Rumput Laut dapat dilihat pada tabel 3.6. Capaian pada tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 85,2 atau sekitar 101,43% dari target yang telah ditetapkan sebesar 84. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, maka nilai PM SAKIP terjadi pertumbuhan sebesar 2,90. Sementara itu, kenaikan pertumbuhan 2021-2025 sebesar 16,09.

Tabel 3.7. Nilai PM SAKIP Lingkup Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025

No	Unit Kerja	Nilai	Predikat
1.	Direktorat Rumput Laut	85,20	A
2.	Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	85,20	A
3.	Direktorat Ikan Air Tawar	84,75	A
4.	Direktorat Ikan Air Payau	83,55	A
5.	Direktorat Ikan Air Laut	84,45	A
6.	Direktorat Prasarana dan Sarana	-	-

Berdasarkan Tabel 3.7., predikat nilai PM SAKIP lingkup Satker Ditjen Perikanan Budi Daya adalah A, artinya mendapat nilai akuntabilitas yang sangat baik. Nilai PM SAKIP Direktorat Rumput Laut dan Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya memperoleh hasil yang sama dan tertinggi, yaitu 85,20. Urutan berikutnya yaitu Direktorat Ikan Air Tawar (84,75); Direktorat Ikan Air Laut (84,45); dan Direktorat Ikan Air Payau (83,55). Sedangkan Direktorat Prasarana dan Sarana belum mendapatkan nilai PM SAKIP karena Direktorat baru berdasarkan Permen No.2 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Rencana aksi pada tahun 2026, maka Direktorat Rumput Laut akan memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk dapat memenuhi nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Rumput Laut.

3.2.2.2. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut

Indikator kinerja ini adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni:

- a. Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi: a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga); b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua); c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat); d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga); e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-1 (Diploma-Satu)/ SLTA Sederajat; dan f. Pendidikan di bawah SLTA. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: a. Diklat Kepemimpinan; b. Diklat Fungsional; c. Diklat Teknis; dan d. Seminar/Workshop/Konferensi/Setara. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. Disiplin, diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat). Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Tabel 3.8. Indeks Profesional ASN Satker Direktorat Rumput Laut Tahun 2025

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut								
IKU: Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut								
Realisasi Tahun 2021-2024				Tahun 2025			Pertumbuhan 2024-2025	Rata-rata Pertumbuhan 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target (indeks)	Realisasi (indeks)	% Capaian		
78,78	81,88	84,91	89,46	81	83,26	102,79%	-6,93	1,52

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut Tahun 2025 sebesar 83,26 atau 102,79% terhadap target tahunan dan target Renstra DJPB tahun 2025-2029 sebesar 81. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi penurunan nilai sebesar 6,93. Hal ini terjadi karena adanya mutasi pegawai, sehingga jumlah pegawai di Direktorat Rumput Laut lebih sedikit atau berkurang dari sebelumnya. Hal ini mempengaruhi nilai IP ASN karena dari dimensi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin terjadi perubahan. Sedangkan kenaikan pertumbuhan 2021-2025 mengalami peningkatan sebesar 1,52.

Tabel 3.9. Indeks Profesional ASN Lingkup Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025

No	Unit Kerja	Indeks	Kategori
1.	Direktorat Rumput Laut	83,26	Tinggi
2.	Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	78,66	Sedang
3.	Direktorat Ikan Air Tawar	80,52	Sedang
4.	Direktorat Ikan Air Payau	81,29	Tinggi
5.	Direktorat Ikan Air Laut	81,24	Tinggi
6.	Direktorat Prasarana dan Sarana	83,05	Tinggi

Berdasarkan table 3.9., sebanyak 4 (empat) Sakter mendapatkan kategori indeks tinggi, yaitu Direktorat Rumput Laut (83,26); Direktorat Prasarana dan Sarana (83,05); Direktorat Ikan Air Payau (81,29); dan Direktorat Ikan Air Laut (81,24). Sementara itu, Direktorat Ikan Air Tawar dan Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya mendapatkan kategori sedang dengan nilai masing-masing 80,52 dan 78,66.

Rencana aksi tahun 2026 yaitu diharapkan seluruh pegawai dapat meningkatkan kompetensinya dengan cara mengikuti seminar dan/atau pelatihan, baik secara daring maupun luring.

3.2.2.3. Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Rumput Laut

Indikator kinerja ini bersifat tahunan dan dihitung berdasarkan penyelesaian LHP BPK Direktorat Rumput Laut. Indikator kinerja ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian

dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 3.10. Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Rumput Laut Tahun 2025

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut								
IKU: Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Rumput Laut								
Realisasi Tahun 2021-2024				Tahun 2025			Pertumbuhan 2024-2025	Rata-rata Pertumbuhan 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target (persen)	Realisasi (persen)	% Capaian		
100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	N/A	0

Indikator kinerja persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut tahun 2025 ini diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada laporan keuangan KKP tahun 2025 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi LHP BPK yang sudah diselesaikan pada tahun 2025. Direktorat Rumput Laut sampai akhir tahun 2025 telah tuntas menyelesaikan temuan LHP BPK, kondisi ini dapat dipastikan dengan hasil penyelesaian temuan BPK yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode akhir tahun 2025 sebesar 100 % (tuntas).

Tabel 3.11. Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025

No	Unit Kerja	Temuan LHP BPK	Temuan yang diselesaikan	Tuntas (%)
1.	Direktorat Rumput Laut	119.635.797	119.635.797	100%
2.	Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	-	-	100%
3.	Direktorat Ikan Air Tawar	-	-	100%
4.	Direktorat Ikan Air Payau	-	-	100%
5.	Direktorat Ikan Air Laut	-	-	100%
6.	Direktorat Prasarana dan Sarana	-	-	100%

Berdasarkan tabel 3.11., Direktorat Rumput Laut memiliki temuan BPK senilai Rp. 119.635.797 dan telah diselesaikan 100%. Sementara itu, Satker lainnya tidak memiliki temuan BPK.

Rencana aksi atas hasil capaian pada tahun 2025 yang akan dilakukan pada tahun 2026 adalah Direktorat Rumput Laut mempertahankan atas hasil yang diperoleh dan memperbaiki sistem pelaporan untuk mendukung pemenuhan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

3.2.2.4. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup satker Direktorat Rumput Laut yang tindak lanjutnya dari Direktorat Rumput Laut telah tuntas berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Rumput Laut berdasarkan LHP (terbatas pada LHP audit, reviu dan evaluasi baik bentuk surat) yang terbit pada tahun yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Rumput Laut yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 3.12. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Rumput Laut Tahun 2025

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut								
IKU: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut								
Realisasi Tahun 2021-2024				Tahun 2025			Pertumbuhan 2024-2025	Rata-rata Pertumbuhan 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target (persen)	Realisasi (persen)	% Capaian		
100%	100%	100%	-	85%	94,59%	111,28%	N/A	0

Pada tahun 2025, capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker Direktorat Rumput Laut sebesar 94,59% atau 111,28% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 85%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka tidak terdapat kenaikan pencapaian, karena nilai yang dicapai merupakan angka yang sudah maksimal.

Tabel 3.13. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025

No	Unit Kerja	Capaian IKU (%)
1.	Direktorat Rumput Laut	94,59
2.	Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	-
3.	Direktorat Ikan Air Tawar	93,75
4.	Direktorat Ikan Air Payau	100
5.	Direktorat Ikan Air Laut	100
6.	Direktorat Prasarana dan Sarana	98,28

Berdasarkan tabel 3.13., capaian tertinggi terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah Direktorat Ikan Air Payau dan Direktorat Ikan Air Laut yaitu 100%. Capaian tertinggi kedua yaitu Direktorat Prasarana dan Sarana sebesar 98,28%, kemudian Direktorat Rumput Laut sebesar 94,59%, dan Direktorat Ikan Air Tawar sebesar 93,75%. Sementara itu, Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya tidak tercantum capaian IKU-nya.

Rencana aksi pada tahun 2026, yaitu Direktorat Rumput Laut melakukan penyelesaian hasil pengawasan dengan mengupayakan semua kegiatan dalam administrasi kegiatan agar bisa dilengkapi dan tepat waktu serta akuntabel.

3.2.2.5. Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut

Persentase layanan perkantoran Direktorat Rumput Laut adalah indikator kinerja kegiatan yang pencapaiannya perlu dilaksanakan karena indikator kinerja ini merupakan ukuran atas pelaksanaan layanan perkantoran yang meliputi pelayanan jasa dan administrasi yang dilaksanakan di Direktorat Rumput Laut.

Tabel 3.14. Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut Tahun 2025

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut									
IKU: Layanan Perkantoran									
Realisasi Tahun 2021-2024				Tahun 2025			Pertumbuhan 2024-2025	Rata-rata Pertumbuhan 2021-2025	
2021	2022	2023	2024	Target (persen)	Realisasi (persen)	% Capaian			
100%	100%	100%	100%	80	100	125%	0	6,25	

Capaian indikator kegiatan persentase pelaksanaan layanan perkantoran tahun 2025 seperti tertera dalam tabel 3.14., realisasi mencapai 100% atau sekitar 125% dari target 80% yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator ini merupakan hasil kerja Direktorat Rumput Laut terutama terkait pelayanan perkantoran seperti pelayanan persuratan dan layanan rapat yang dilakukan secara *offline* semuanya telah tuntas dilakukan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, capaian tahun 2025 sama dengan capaian tahun 2024. Kenaikan pertumbuhan 2021-2025 mengalami peningkatan sebesar 6,25. Rencana aksi tahun 2025 yang akan dilakukan pada tahun 2026 adalah mempertahankan hasil maksimal untuk capaian pada tahun 2026.

3.2.2.6. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut

Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Dalam kegiatan ini akan dilakukan audit kearsipan yang merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Kearsipan sendiri adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tabel 3.15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut Tahun 2025

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut								
IKU: Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut								
Realisasi Tahun 2021-2024				Tahun 2025			Pertumbuhan 2024-2025	Rata-rata Pertumbuhan 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	% Capaian		
-	-	-	79,75	80	73,52	92,9%	-7,81	-7,81

Capaian indikator kegiatan nilai pengawasan kearsipan internal satker Direktorat Rumput Laut tahun 2025 sebesar 73,52 atau 92,19% dari target nilai 80. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan nilai sebesar 7,81. Penurunan nilai ini disebabkan beberapa hal, diantaranya pemahaman tim penilai yang tidak seragam, serta dokumen yang tidak ditandatangani secara TTDE yang diajukan untuk penilaian tidak mencapai jumlah minimal, yaitu 10 dokumen.

Tabel 3.16. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025

No	Unit Kerja	Nilai	Kategori
1.	Direktorat Rumput Laut	73,52	BB (Sangat Baik)
2.	Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	96,21	AA (Sangat Memuaskan)
3.	Direktorat Ikan Air Tawar	79,18	BB (Sangat Baik)
4.	Direktorat Ikan Air Payau	83,13	A (Memuaskan)
5.	Direktorat Ikan Air Laut	84,27	A (Memuaskan)
6.	Direktorat Prasarana dan Sarana	-	-

Berdasarkan tabel 3.16, Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya mendapatkan kategori AA (sangat memuaskan) dengan nilai 96,21. Sedangkan yang mendapatkan kategori A (memuaskan) adalah Direktorat Ikan Air Laut (84,27) dan Direktorat Ikan Air Payau (83,13). Sementara itu, Direktorat Ikan Air Tawar dan Direktorat Rumput Laut berada pada kategori BB (sangat baik) dengan nilai masing-masing sebesar 79,18 dan 73,52. Direktorat Prasarana dan Sarana belum mendapatkan nilai pengawasan kearsipan internal karena Direktorat baru berdasarkan Permen No.2 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Rencana aksi untuk tahun 2026 adalah Direktorat Rumput Laut berupaya untuk memenuhi hal-hal yang menjadi tolok ukur dalam penilaiannya sehingga nilai yang diperoleh bisa sesuai dengan target.

3.2.2.7. Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Rumput Laut

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan. Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Rumput Laut adalah indikator kinerja kegiatan yang pencapaiannya berdasarkan pada pelaksanaan penyelesaian identifikasi SOP oleh Direktorat Rumput laut.

Tabel 3.17. Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Rumput Laut Tahun 2025

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut								
IKU: Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Rumput Laut								
Realisasi Tahun 2021-2024				Tahun 2025			Pertumbuhan 2024-2025	Rata-rata Pertumbuhan 2021-2025
2021	2022	2023	2024	Target (persen)	Realisasi (persen)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A

Capaian indikator kegiatan persentase penyelesaian identifikasi SOP satker Direktorat Rumput Laut tahun 2025 yaitu 100% dari target 100%. IKU ini merupakan indikator kinerja yang baru ada pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.18. Penyelesaian Identifikasi SOP Lingkup Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025

No	Unit Kerja	Prosentase
1.	Direktorat Rumput Laut	100%
2.	Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	-
3.	Direktorat Ikan Air Tawar	100%
4.	Direktorat Ikan Air Payau	100%
5.	Direktorat Ikan Air Laut	100%
6.	Direktorat Prasarana dan Sarana	100%

Berdasarkan tabel 3.18., seluruh satker lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya telah melakukan penyelesaian identifikasi SOP 100%. Sementara itu, Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya tidak tercantum prosentasenya.

Rencana aksi untuk tahun 2026 adalah Direktorat Rumput Laut akan melakukan penyelesaian penyusunan draft SOP yang berkaitan dengan Direktorat Rumput Laut.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun anggaran 2025, Direktorat Rumput Laut mendapat total alokasi anggaran sebesar Rp. 10.665.689.000,-. Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 5.012.787.389,- atau 47% dari pagu. Sisa pagu Direktorat Rumput Laut sebesar Rp. 5.652.901.611,-. Capaian realisasi keuangan Direktorat Rumput laut tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tahun Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Rata-Rata Realisasi
2025	10.665.689.000	5.012.787.389	47	89,28
2024	38.681.994.000	38.566.948.218	99,70	
2023	65.698.500.000	65.682.477.022	99,98	
2022	27.283.980.000	27.280.981.295	99,99	
2021	28.184.347.000	28.105.956.354	99,72	

Tabel 3.19. Realisasi Keuangan Direktorat Rumput Laut Tahun 2025

Sejalan dengan kebijakan efisiensi, terdapat anggaran pada Direktorat Rumput laut yang diblokir sebesar Rp. 5.652.100.000,-. Sehingga pagu setelah blokir adalah sebesar Rp.5.013.589.000,-. Realisasi anggaran jika dibandingkan dengan pagu setelah diblokir adalah sebesar 99,98% dengan sisa pagu sebesar Rp. 801.611,-.

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata realisasi anggaran Direktorat Rumput Laut tahun 2021 - 2025 sebesar 89,28%, dengan nilai realisasi terkecil adalah pada tahun 2025 sebesar 47%. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan efisien anggaran, yaitu terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp. 5.652.100.000,- atau 52,99%, sehingga pagu yang dapat digunakan dan direalisasikan hanya sebesar Rp.5.013.589.000,- atau 47,01% dari pagu yang ada.

Selain itu, dari tabel dapat dilihat bahwa pagu pada tahun 2025 merupakan pagu yang paling sedikit dibandingkan dengan tahun 2021 - 2024.

BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Rumput Laut tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian positif dan akuntabel, tercermin dari nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 108,37 dan tercapai 10 dari 11 indikator kinerja utama dan manajerial. Hal ini mengindikasikan efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung agenda pembangunan subsektor budi daya rumput laut, serta kontribusi terhadap pencapaian target prioritas nasional dan Renstra DJPB 2025-2029.
2. Pelaksanaan program teknis strategis berhasil memberikan penguatan kapasitas pembudi daya dan sistem produksi, diantaranya melalui pengembangan kawasan budi daya LAUTRA, penyaluran bantuan bibit rumput laut kultur jaringan kepada masyarakat, pembinaan penerapan CBIB budi daya rumput laut, dan kebijakan tata kelola budi daya rumput laut.
3. Kendala struktural dan administratif masih dijumpai meskipun tidak menghambat output utama kinerja Direktorat Rumput Laut, seperti efisiensi anggaran, serta belum tercapainya indikator nilai pengawasan kearsipan internal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan tata kelola internal, harmonisasi regulasi pendukung, dan penguatan koordinasi lintas unit kerja dan lintas daerah untuk memperkuat aspek akuntabilitas dan keberlanjutan program.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Direktorat Rumput Laut tahun 2025 sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, antara lain:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut karena realisasi tidak mencapai target yang ditentukan pada tahun 2025.	Penyempurnaan tata kelola dukungan manajerial dan administratif pada pelaksanaan kearsipan.

2	Sosialisasi CBIB budi daya rumput laut yang dilakukan secara daring, sehingga memiliki keterbatasan dalam menjamin kedalaman pemahaman dan konsistensi penerapan CBIB di tingkat unit usaha pembudi daya.	Pelaksanaan sosialisasi CBIB budi daya rumput laut diutamakan secara luring, sehingga dapat memastikan pemahaman peserta, serta penerapan CBIB budi daya rumput laut tidak hanya bersifat sosialisasi, namun terimplementasi secara konsisten di unit pembudi daya.
3	Sinkronisasi program antara pusat dan daerah dalam hal perencanaan dan pelaksanaannya belum berjalan secara optimal.	Penguatan kolaborasi kegiatan pengembangan budi daya rumput laut antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh perikanan, swasta, pembudi daya, serta stakeholder lainnya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2025 Awal



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT RUMPUT LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nono Hartanto**
Jabatan : **Direktur Rumput Laut**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb Haeru Rahayu**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Rumput Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nono Hartanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT RUMPUT LAUT**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	1. Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	170
	2. Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas (Unit)	1
	3. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat (kg)	37.500
	4. Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB) (Unit)	14
	5. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut (Rekomendasi Kebijakan)	6
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut	6. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut (Nilai)	84
	7. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut (indeks)	81
	8. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut (Persen)	100
	9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut (Persen)	85
	10. Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	80
	11. Nilai pengawasan kearsipan internal satker Direktorat Rumput Laut (Nilai)	80
	12. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut (Persen)	65

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Rumput Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nono Hartanto

DATA ANGGARAN :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	10.514.000.000
2.	Dukungan Manajerial	500.000.000
Total Anggaran Direktorat Rumput Laut Tahun 2025		11.014.000.000

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Rumput Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nono Hartanto

2. Perjanjian Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2025 Revisi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT RUMPUT LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nono Hartanto**
Jabatan : **Direktur Rumput Laut**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Rumput Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nono Hartanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT RUMPUT LAUT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	1.	Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas (Unit)	1
		2.	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat (kg)	14.619
		3.	Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB) (Unit)	14
		4.	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut yang Disusun (Rekomendasi Kebijakan)	6
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut	5.	Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut (Nilai)	84
		6.	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut (indeks)	81
		7.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Rumput Laut (Persen)	100
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut (Persen)	85
		9.	Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	80
		10.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut (Nilai)	80
		11.	Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Rumput Laut (Persen)	100

DATA ANGGARAN:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	10.665.689.000
2.	Dukungan Manajerial	254.364.000
Total Anggaran Direktorat Rumput Laut Tahun 2025		10.920.053.000

Jakarta, 1 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Rumput Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nono Hartanto